

**SISI GELAP DUNIA MALAM BANDUNGAN
(Studi Kasus Kekerasan Pada Kehidupan Pekerja Seks Komersial di
Bandungan)**

Tanazza Chinta Ariestia¹, Carolina Retmawati Putri²

AFILIASI

¹ Mahasiswa Program Studi

Antropologi Sosial FIB
Universitas Diponegoro

² Program Studi

Antropologi Sosial FIB
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto,

Tembalang, Kec.

Tembalang, Kota Semarang,

Jawa Tengah 50275

Corresponding author:

tanazzzzzzzzza@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas fenomena pekerja seks komersial (PSK) di Bandungan, Kabupaten Semarang, dengan fokus pada bentuk kekerasan yang mereka alami serta dampaknya terhadap kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk mendalami pengalaman subjektif para PSK, serta dilengkapi studi literatur sebagai sumber data sekunder. Wawancara dilakukan terhadap dua orang PSK dan dua warga yang memiliki hubungan sosial dekat dengan mereka. Selain itu, data dari sejumlah berita daring turut digunakan untuk memperluas analisis, menggambarkan dinamika lokalisasi, serta kecenderungan kekerasan terhadap PSK di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para PSK datang dari berbagai latar belakang, selain itu ditemukan data bahwa mereka mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Fenomena kekerasan fisik yang ditemukan seperti pemukulan hingga pembunuhan, kekerasan psikis berupa stigma dan pengucilan sosial, serta kekerasan seksual yang terjadi dalam bentuk paksaan hubungan seksual di luar kehendak mereka dan pelecehan seksual dalam bentuk verbal. Ditemukan pula kasus kehamilan yang tidak diinginkan dan penelantaran anak, sebagai dampak dari relasi kuasa yang timpang antara PSK dan pelanggan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PSK berada dalam posisi yang sangat rentan akibat ketimpangan struktural, tekanan ekonomi, dan kurangnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lintas sektor yang berpihak pada kemanusiaan guna menjamin perlindungan hak-hak dasar mereka dan menghapus stigma terhadap profesi ini.

Keywords: pekerja seks komersial, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan fisik

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai perempuan tidak jarang kita sering mendengar bahwa perempuan menjadi suatu obyek untuk seksualitas. Salah satu bentuk nyata dari perempuan yang sering ditempatkan sebagai objek seksualitas adalah melalui pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK), di mana tubuh perempuan kerap dipandang semata-mata sebagai komoditas. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa dalam dunia kerja, perempuan kerap dianggap lebih mudah memperoleh pekerjaan dibanding laki-laki. Namun, kemudahan ini terkadang disalahgunakan oleh sebagian perempuan dengan tingkat pendidikan rendah yang memilih menjadi PSK, karena pekerjaan tersebut dinilai lebih mudah dilakukan, tidak memerlukan keterampilan berpikir kompleks, dan menghasilkan uang dengan cepat dibanding pekerjaan lain seperti buruh atau asisten rumah tangga. Hidayati (2023) menjelaskan bahwa perempuan-perempuan ini cenderung mengabaikan pendidikan formal, terutama karena krisis ekonomi yang memicu tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Sementara laki-laki mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan tanpa pendidikan tinggi, perempuan justru cenderung lebih diterima meski tanpa bekal pendidikan yang memadai.

Pekerja seks komersial atau PSK identik dengan prostitusi, baik *online* maupun *onsite* di hotel. PSK didefinisikan sebagai perempuan yang memberikan layanan seksual atas permintaan dengan tujuan memuaskan pelanggan, dan sebagai gantinya menerima imbalan berupa uang atau barang. Dewasastra dalam Hidayati (2023) menjelaskan bahwa PSK merupakan individu yang melakukan aktivitas seksual sebagai bentuk pekerjaan untuk mendapatkan upah dari pengguna jasa tersebut. Keberadaan PSK dapat ditemukan di berbagai tempat, mulai dari lokasi prostitusi yang bersifat tetap hingga penggunaan aplikasi digital seperti *MiChat* sebagai media untuk menawarkan layanan seksual. Utomo (2022) mengutip data dari Kementerian Sosial tahun 2015 yang mencatat bahwa jumlah PSK di Indonesia mencapai 64.435 orang yang tersebar di 168 lokalisasi. Sementara itu, data dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial per Oktober 2016 menunjukkan bahwa terdapat 143 lokalisasi aktif dengan 19.726 PSK yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Di daerah Kabupaten Semarang terdapat dua lokasi yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Pertama di daerah Tegal Panas di Dusun Tegalrejo, Desa Jatijajar, Bergas, Kabupaten Semarang yang sering disebut Galpanas. Tempat kedua berada di daerah Kecamatan Bandungan. Bandungan adalah sebuah kecamatan yang terletak di lereng Gunung Ungaran yang telah dikenal sejak masa kolonial sampai sekarang dengan wisata pegunungannya, baik air terjun, taman bunga, susur sungai dan wisata pendakian gunung. Selain itu Bandungan juga terkenal akan wisata sayur dan buah yang sangat melimpah dengan sebagai komoditas asli di daerah Bandungan yang menarik perhatian wisatawan asing. Wisata terbaru di Bandungan merupakan alun-alun yang diputari oleh sentra kuliner setempat yang terdapat di pusat Bandungan itu sendiri. Meskipun dikenal sebagai destinasi wisata keluarga, Bandungan juga telah lama dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki aktivitas prostitusi. Menurut Santury et al. (2022) lokasi wisata dan area prostitusi di Bandungan bahkan hanya dipisahkan

oleh jalan raya utama. Salah satu titik prostitusi tertua di wilayah ini adalah Kalinyamat, telah beroperasi sejak tahun 1970-an dan dikenal sebagai ikon aktivitas prostitusi di Bandungan.

Di balik geliat wisata yang berkembang di Bandungan, realitas sosial yang menyertai keberadaan pekerja seks komersial (PSK) menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh kerentanan. PSK di kawasan ini sering kali berada dalam posisi yang tidak aman, baik secara sosial maupun hukum. Stigma masyarakat terhadap profesi mereka membuat para pekerja seks kesulitan memperoleh perlindungan ketika mengalami kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Ketimpangan relasi antara PSK dan pelanggan, ditambah minimnya pengawasan serta tidak adanya sistem perlindungan yang memadai, menjadikan mereka rentan mengalami perlakuan semena-mena. Dalam banyak kasus, kekerasan tersebut dianggap hal biasa, karena masyarakat cenderung menutup mata terhadap kondisi yang mereka alami.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mencoba mengkaji hubungan antara profesi pekerja seks komersial dengan bentuk-bentuk kekerasan yang kerap mereka alami, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Isu ini juga marak diberitakan di media sosial, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap pekerja seks merupakan persoalan serius dan terus berlangsung. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2023) di salah satu tempat karaoke di Jember mengungkapkan bahwa para PSK di sana mengalami kekerasan fisik seperti dipukul, dijambak, digigit, ditendang, hingga disulut rokok. Tak jarang pula mereka dipaksa berhubungan intim di tempat-tempat yang tidak layak, seperti kamar mandi. Kekerasan psikis juga banyak terjadi, berupa stigma negatif, penghinaan, pengucilan, penipuan, hingga janji-janji palsu. Sementara itu, kekerasan seksual meliputi pemaksaan untuk melayani lebih dari satu pelanggan sekaligus, melayani saat menstruasi, bahkan dipaksa melakukan hubungan seksual secara anal. Selain berbagai bentuk kekerasan tersebut, kasus ekstrem seperti pembunuhan terhadap pekerja seks komersial juga tercatat pernah terjadi. Dalam konteks ini, penulis merujuk pada konsep femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gender mereka. Sabrina (2024) mengutip pendapat Salamor et al., menjelaskan bahwa femisida merupakan bentuk pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh kebencian terhadap perempuan, serta dorongan untuk menaklukkan, menguasai, atau merendahkan mereka.

Kekerasan, dalam bentuk apa pun, jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks pekerja seks komersial (PSK), meskipun pekerjaan mereka sering dipandang negatif oleh masyarakat, perlindungan hukum tetap menjadi hak dasar yang tidak dapat dikesampingkan. Komnas Perempuan (2019) dalam bukunya yang berjudul *Risalah Kebijakan: Perempuan yang Dilacurkan, Masih Adakah Hak Kami?*, menegaskan bahwa PSK juga memiliki hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang, termasuk perempuan yang bekerja di sektor-sektor marjinal, berhak untuk tidak disiksa, tidak didiskriminasi, dan diperlakukan setara di hadapan hukum. Namun kenyataannya, perempuan yang terlibat dalam pekerjaan seks masih sering mengalami diskriminasi yang bersumber dari

stigma sosial, budaya, dan keagamaan. Mereka dianggap melanggar norma yang hidup dalam masyarakat, padahal sebagian besar dari mereka berada dalam situasi yang memaksa. Negara semestinya hadir untuk melindungi perempuan dalam posisi rentan ini, termasuk mereka yang menjadi PSK karena tekanan ekonomi atau sosial. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara, sebagaimana diatur dalam undang-undang, seharusnya menjadi tanggung jawab negara tanpa memandang latar belakang profesi.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh pekerja seks komersial di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dalam pemahaman mengenai kekerasan yang dialami oleh pekerja seks komersial di Bandungan. Fokus utama penelitian adalah menggali makna yang terkandung dalam tindakan dan pengalaman para pekerja seks yang menghadapi kekerasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interaktif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang realitas sosial yang dialami oleh kelompok ini. Mengutip pendapat Ralf Dahrendorf yang menyatakan bahwa konflik dalam masyarakat bukan hanya merupakan akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan, tetapi juga hasil dari perbedaan kepentingan antar kelompok sosial. Ketegangan ini muncul ketika ada pertentangan antara kelompok yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun sosial. Dalam Rahmaniah (2016) otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; karena itu ada dua, hanya ada dua, kelompok konflik yang dapat dibentuk di dalam setiap asosiasi. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu “yang arah dan substansinya saling bertentangan”. Di sini kita diperhadapkan dengan konsep kunci lain dalam teori konflik Dahrendorf, yakni kepentingan. Kelompok yang berada di atas dan yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama. Berdasarkan perspektif ini, penelitian ini disusun untuk mengkaji lebih dalam mengenai dinamika kekerasan terhadap pekerja seks komersial, yang dijabarkan dalam artikel berjudul “Sisi Gelap Dunia Malam Bandungan: Studi Kasus Kekerasan Terhadap Pekerja Seks Komersial di Bandungan”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dan menggunakan studi literature sebagai sumber data sekunder untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai realitas sosial para pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Bandungan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2024. Metode etnografi, yang bertujuan untuk memahami realitas sosial dan pengalaman hidup para pekerja seks komersial (PSK) secara mendalam dalam konteks keseharian mereka. Pendekatan etnografi dipilih karena peneliti dapat terlibat langsung dalam lingkungan sosial para informan, sehingga mampu menangkap makna, kebiasaan, dan dinamika interaksi yang terjadi secara lebih menyeluruh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur, agar proses wawancara berlangsung secara fleksibel dan terbuka, mengikuti alur pembicaraan serta pengalaman yang disampaikan oleh informan. Wawancara dilakukan terhadap dua orang PSK yang bekerja di

wilayah Bandungan, baik secara langsung (*onsite*) maupun melalui layanan daring (*online*). Selain itu, peneliti juga mewawancarai dua orang warga yang tinggal di lingkungan para PSK dan memiliki hubungan sosial yang cukup dekat dengan mereka. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi literatur sebagai sumber data sekunder. Studi literatur ini mencakup analisis terhadap berbagai artikel ilmiah dan berita *online* yang berkaitan dengan fenomena pekerja seks komersial dan lokalisasi di Bandungan. Data dari studi literatur ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan lapangan serta memberikan gambaran kontekstual yang lebih luas mengenai kondisi sosial dan kekerasan yang dialami oleh PSK di daerah tersebut.

Lokasi penelitian difokuskan di Desa Junggul, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, yang dikenal sebagai salah satu area aktivitas pekerja seks di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan tingginya intensitas aktivitas pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Bandungan, Kabupaten Semarang. Kawasan ini dikenal memiliki banyak hotel dan tempat karaoke yang tersebar di sepanjang jalur menuju Kota Semarang, dengan kelas hotel yang beragam—mulai dari kelas melati hingga hotel bintang empat. Menurut Santury et al. 2022 aktivitas karaoke dan prostitusi tersebar di beberapa desa seperti Ngunut, Jetak, dan Kalinyamat. Ketiga lokasi ini berada di tengah-tengah permukiman warga, yang menunjukkan bahwa aktivitas prostitusi di Bandungan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari ketiga lokasi tersebut, Kalinyamat dan Dusun Ngunut memiliki karakteristik khusus, karena selain menjadi tempat transaksi seksual, juga menjadi tempat tinggal para PSK. Hal ini menjadikan dua wilayah tersebut sebagai titik dengan tingkat keberadaan PSK yang relatif tinggi dan mudah dijumpai sepanjang waktu.

Selain itu, di Bandungan juga terdapat beberapa panti yang secara terbuka memajang LC (*Ladies Companion*) dan PSK untuk dipilih oleh para tamu. LC sendiri hanya bertugas menemani tamu bernyanyi di karaoke tanpa keterlibatan seksual, sementara PSK melayani kebutuhan seksual pelanggan. Meski berbeda peran, beberapa perempuan di Bandungan menjalani kedua peran tersebut sekaligus. Promosi jasa oleh para PSK tidak hanya dilakukan secara langsung di panti, tetapi juga melalui aplikasi digital seperti TikTok, Bigo, dan Mi Chat. Selain itu, pemesanan layanan juga dapat dilakukan melalui perantara lokal seperti PTL (Pengantar Tamu Losmen), yang bertugas mencari pelanggan bagi para pemandu karaoke (PK) atau PSK. Dinamika inilah yang menjadikan Kalinyamat dan Dusun Ngunut sebagai lokasi yang paling representatif untuk dijadikan tempat penelitian, karena menunjukkan interaksi langsung antara praktik prostitusi dan kehidupan sosial masyarakat.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui wawancara mendalam, kemudian di transkripsikan untuk memastikan akurasi informasi yang diperoleh. Seluruh data informan akan dijaga kerahasiaannya. Setelah transkrip selesai, jawaban-jawaban dari responden dipetakan untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai tema utama terkait dengan kekerasan yang dialami oleh pekerja seks komersial (PSK) di Bandungan. Selain itu untuk memberikan data yang lebih

lengkap analisis data juga dilengkapi dengan data sekunder berupa artikel dan sumber bacaan pendukungnya seperti berita online. Data sekunder akan memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam terhadap data yang diteliti. Sumber berita online yang relevan dengan studi kasus akan dianalisis untuk menambah perspektif dan validitas temuan dengan cara membandingkannya dengan pengalaman yang diungkapkan oleh responden.

HASIL dan PEMBAHASAN

Potret Sosial dan Dinamika Kehidupan Pekerja Seks Komersial di Bandungan

Kehidupan pekerja seks komersial (PSK) di Bandungan tidak dapat dilepaskan dari keragaman latar belakang sosial para pelakunya. Mayoritas dari mereka merupakan pendatang dari daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, Pekalongan, Tegal, dan Batang, meskipun tidak sedikit pula yang berasal dari wilayah Bandungan sendiri. Pekerjaan ini tidak selalu dijalani secara penuh waktu; sebagian menjadikan aktivitas tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Mereka berasal dari berbagai profesi, seperti buruh pabrik, ibu rumah tangga, hingga mahasiswi, bahkan terdapat pula remaja di bawah umur yang terlibat. Fakta ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam dunia prostitusi tidak hanya didorong oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari tekanan ekonomi dan keterbatasan pilihan hidup yang dihadapi oleh perempuan dalam berbagai lapisan sosial.

Faktor-faktor yang mendasari mereka memilih untuk menjadi pekerja seks komersial selain mendapatkan uang yang singkat dan mudah adalah kesulitan ekonomi atau mengalami kemiskinan, kemudian faktor dari pendidikan yang rendah, faktor lingkungan yang membuat mereka juga mengikuti jejak dari teman atau keluarganya sendiri, kemudian ada juga faktor kebutuhan biologis atau hiperseks, faktor sosial seperti pengucilan dan diskriminasi, krisis ekonomi, urbanisasi dan perubahan sosial, adanya interaksi sosial dengan PSK yang lebih dahulu bekerja, kemudian secara internal ada proses kognitif yang merupakan persepsi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan PSK seperti contoh memiliki uang yang banyak, cepat dan dapat hidup foya-foya dan yang terakhir adalah ingin mencapai kehidupan yang lebih baik melalui jalur melacurkan diri. Permata & Pinasthi (2017) menjelaskan bahwa PSK tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan cara yang dilakukan kebanyakan orang, karena pendidikan mereka rendah. Ketiadaan kemampuan dasar untuk masuk dalam pasar kerja yang memerlukan persyaratan pendidikan relatif tinggi menjadikan mereka tidak dapat memasukinya. Akhirnya mereka terjerumus menjadi PSK yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka tanpa perlu harus menggunakan skill atau pendidikan tinggi.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Rakmah & Putra (2024) yang menyatakan bahwa, Wanita yang menjadi PSK di pub-pub¹ seringkali mengalami kesulitan ekonomi, mendorong mereka untuk mencari penghidupan di ibu kota atau kota-kota besar di luar Pulau Jawa. Meskipun berusaha mengatasi masalah ekonomi, banyak dari mereka yang malah terjerumus ke

¹ KBBI, pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan music sambal minum-minum yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).

dalam prostitusi, melupakan akal dan nurani. Beberapa PSK di Makassar, seperti yang di Pub MR, bahkan sudah berkeluarga dan memiliki anak. Selain itu Rakhmah & Putra (2024) juga menjelaskan bahwa menurut perspektif antropologi ekonomi, PSK membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun profesi ini dianggap merugikan kepribadian, keluarga, dan sosial. Rata-rata pendidikan rendah para PSK disebabkan oleh keterbatasan ekonomi keluarga yang tak mampu membiayai pendidikan, membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

Salah satu sumber yang menggambarkan latar belakang pekerja seks komersial di Bandung adalah laporan wawancara yang dimuat oleh *Jateng Pos* (Budiman, 2022). Dalam laporan tersebut, Budiman melakukan wawancara terhadap Dewi (48 tahun), Ketua komunitas Perkumpulan Pekerja Wisata (Perkawis) yang aktif mendampingi para PSK di Bandung. Melalui wawancara tersebut Budiman menanyakan mengenai latar belakang dan alasan seseorang menjadi PSK di sana.

“Awalnya sebagai buruh pabrik. Dengan penghasilan yang pas-pasan, mereka terpaksa mencari tambahan. Begitupun ibu rumah tangga dari luar. Uang belanja yang kurang juga membuatnya ikut mangkal. Oknum mahasiswi pun sama. Terpaksa mangkal buat om-om di Bandungan untuk biaya kuliah. Ironi memang. Tapi itulah faktanya. Mungkin orang tidak percaya, tapi saya sebagai Ketua Perkawis yang mendampingi mereka tahu siapa diantara mereka,” jelas Dewi (48 tahun) melalui wawancara dalam *Jateng Pos* 2022.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa latar belakang perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Bandungan sangat beragam, mulai dari buruh pabrik, ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga siswi di bawah umur. Beberapa dari mereka menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama, sementara yang lain melakoninya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan untuk terjun ke dunia prostitusi tidak selalu lahir dari satu sebab tunggal, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan pribadi. Hal ini mencerminkan kompleksitas dinamika sosial yang melatarbelakangi pilihan mereka, di mana pekerjaan sebagai PSK kerap menjadi jalan pintas dalam menghadapi keterbatasan hidup. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks kehidupan para PSK secara lebih mendalam sebelum memberikan penilaian moral semata.

Mengutip pendapat informan, “Bukan sekadar mencari kambing hitam. Alasan ekonomi memang sering menjadi penyebab para kaum hawa tersebut terjun dunia malam”, ungkap Dewi, Ketua komunitas Perkawis, dalam pernyataannya yang dimuat dalam surat kabar *online Jateng Pos*. Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa mayoritas perempuan yang bekerja sebagai PSK di Bandungan melakukan pilihan tersebut karena tidak memiliki alternatif lain yang mampu menjamin penghasilan secara cepat dan mencukupi. Pernyataan bahwa ekonomi menjadi faktor utama pendorong perempuan terlibat dalam praktik prostitusi bukanlah bentuk pengalihan

tanggung jawab atau upaya mencari kambing hitam. Justru, alasan ekonomi merupakan kenyataan yang kerap dihadapi oleh banyak perempuan yang mengalami tekanan hidup akibat kemiskinan struktural.

“Dari 600 cewek yang memang profesinya jual diri di Bandungan, kata Dewi semua alasannya sama. Mereka umumnya orang tidak punya. Lalu ada masalah keluarganya berakhir cerai. Sementara harus menghidupi anak sendirian. Tidak punya cara lain kecuali menjual diri. Selain hasilnya lebih besar, itu jalan pintas daripada harus membuka usaha atau bekerja ikut orang. Kalau saya tanya, mereka itu ya sudah pernah mencoba usaha atau bekerja halal, tapi hasilnya jauh dari cukup. Bayangkan ada yang cerai ditinggali 2 anak atau 5 anak sendirian, ya akhirnya cari jalan pintas”, Dewi (48 tahun) melalui wawancara dalam Jateng Pos 2022.

Berbagai kisah yang diungkapkan oleh Dewi mencerminkan betapa kompleksnya latar belakang dan motivasi para perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi di Bandungan. Pilihan menjadi pekerja seks komersial sering kali bukan karena keinginan, melainkan karena keterpaksaan situasional akibat tekanan ekonomi, keterbatasan pendidikan, dan kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak. Dalam kondisi seperti ini, perempuan dituntut untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarganya, bahkan jika itu berarti harus menempuh jalan yang berisiko dan sarat stigma.

Selanjutnya apabila kita berbicara mengenai tarif PSK di Kawasan Bandungan jawabannya akan sangat beragam. Variasi tarif ini juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, seperti pengalaman PSK, penampilan fisik, tingkat permintaan pelanggan, serta jam operasional atau hari-hari tertentu seperti akhir pekan yang biasanya lebih ramai. Selain itu, beberapa PSK memilih untuk bekerja secara independen tanpa berada di bawah naungan panti atau agensi, yang memungkinkan mereka untuk menentukan tarif sendiri sesuai kesepakatan pribadi dengan pelanggan. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi di Bandungan tidak hanya berlangsung dalam sistem yang terorganisasi, tetapi juga mencakup hubungan informal dan fleksibel yang menunjukkan beragam bentuk transaksi seksual di tengah masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Budiman (2022) dalam artikel yang dimuat di Jateng Pos, tarif pekerja seks komersial (PSK) di Bandungan sangat bervariasi seperti jawaban Dewi ketua Perkawis berikut ini.

“Bayangkan, jika satu cewek semalam dapat satu tamu saja, dengan tarif *short time* rata-rata Rp 250 ribu, dikalikan 600 atau 1000 anak, maka semalam Bandungan bisa menghasilkan omset wisata Rp 150 juta atau Rp 250 juta. Itu kalau per anak hanya melayani satu tamu. Padahal semalam, per anak di Bandungan rata-rata melayani 3 tamu. Jika tarif Rp 250 ribu dikalikan 3 pelanggan dikalikan 600 anak atau 1000 anak, semalam Bandungan bisa tembus Rp 450 juta hingga Rp 750 juta. Angka yang sangat besar. Yang menarik kata Dewi, dari 1000 orang malam Minggu itu laku semua. Masuk kampung di Bandungan jika malam Minggu mirip pasar malam. Gang-gang penuh tamu. Hotel-hotel dan karaoke penuh. Pertanyaannya, jika hari biasa ada 600 orang yang mangkal, sedangkan malam Minggu bisa 1000 orang, sisanya yang 400 orang dari

mana? Sekitar 400 wanita yang ikut mangkal di Bandungan itu berasal dari luar Bandungan. Ada buruh pabrik, ibu rumah tangga, mahasiswi, dll. Mereka ikut naik ke Bandungan, istilah orang Semarang ikut *mremo* (cari tambahan uang) di luar profesinya, kata Dewi (48 tahun) melalui wawancara dalam Jateng Pos 2022.

Selain praktik konvensional yang dilakukan di tempat lokalisasi atau melalui agensi, sebagian pekerja seks komersial di Bandungan juga memanfaatkan teknologi digital untuk menawarkan jasanya secara daring. Seiring berkembangnya teknologi, sebagian dari mereka mulai melihat peluang baru melalui *platform* daring, yang dianggap lebih praktis dan relatif aman. Salah satu informan yang bernama Sonya mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi digital sebagai media kerja, khususnya dengan menjadi pekerja seks komersial secara *online*, dinilai lebih praktis dan menghasilkan pendapatan dengan cara yang lebih cepat dibandingkan dengan praktik secara langsung (*onsite*). *Platform* yang digunakan adalah aplikasi Bigo dan Telegram. Informan dapat memperoleh biaya dari Bigo sebanyak 2 juta per bulan dan itu belum termasuk dengan *gift*² yang diberikan oleh *viewers*. Jika dengan *gift* totalnya uang yang didapatkan adalah sekitar enam juta. Selain dari Bigo, informan juga menjual foto di Telegram dengan membuka *Channel* langganan yang menunjukkan pose-pose vulgar dan berisi foto diri telanjang (tanpa baju) seharga 50 ribu untuk satu foto. Konten *live* yang diperlihatkan oleh informan adalah konten menari erotis dengan menggunakan pakaian yang seksi. Setelah bekerja menjadi PSK secara *online* dan mendapatkan banyak uang, kehidupan informan menjadi berubah menjadi lebih baik. Adapun alasan informan menjadi PSK secara *online* dilatarbelakangi untuk membantu ekonomi orang tuanya sehingga informan memutuskan putus kuliah dan fokus bekerja sebagai PSK *online* di Bigo Live. Selain itu informan juga berkata menjadi PSK *online* dinilai lebih aman dari kekerasan secara langsung dan penyakit menular seksual.

Dari penjelasan di atas dapat dikaitkan bahwa keputusan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK), meskipun sarat stigma, bagi sebagian perempuan dianggap sebagai pilihan rasional dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Banyak dari mereka melihat pekerjaan ini sebagai cara cepat untuk mendapatkan penghasilan yang cukup besar dalam waktu singkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rakhmah & Putra, 2024) yang menyatakan bahwa kehidupan PSK cenderung menjadi lebih sejahtera setelah menggeluti bidang tersebut, dalam studinya juga disebutkan bahwa setelah bekerja sebagai seorang PSK, mereka bisa memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan, seperti membeli baju, HP, dll. Bahkan mereka juga bisa membiayai keluarganya yang ada di kampung. Kesulitan di dalam mendapatkan lapangan pekerjaan di jaman sekarang dengan keterbatasan pendidikan yang dimiliki juga menjadi alasan mereka tergoda untuk bekerja sebagai seorang PSK.

Melihat kompleksitas dinamika kehidupan para pekerja seks komersial di Bandungan, termasuk latar belakang yang beragam, pola kerja yang terus beradaptasi dengan teknologi, serta kondisi sosial yang melekat, muncullah kebutuhan akan adanya wadah yang mampu memberikan

² Hadiah, bisa berupa uang ataupun barang

pendampingan, perlindungan, dan pengorganisasian. Dari kebutuhan inilah terbentuk sebuah komunitas bernama Perkawis (Perempuan Pekerja Wisata), yang berperan penting dalam mendampingi para PSK di wilayah tersebut. Lokasi komunitas tersebut berada di daerah Kalinyamat. Perkawis ini memiliki tupoksi menjadi wadah para pekerja seks komersial untuk mendata, membina dan menjaga kesehatan para PSK di Bandungan, yang membentuk komunitas ini adalah para aktivis pembela para PSK. Tempat hiburan malam di Bandungan ini termasuk dalam tempat hiburan yang legal dan dilindungi oleh pemerintah, bahkan wanita penghibur ini disebut sebagai wanita malam/objek wisata. Perkawis didirikan oleh masyarakat asli Kalinyamat, yakni Ratna. Ratna merupakan warga Kalinyamat yang memiliki usaha kontrakan serta terlibat dalam Asosiasi Karaoke Bandungan. Istilah “Pekerja Wisata” dipilih karena alasan khusus, di mana penggunaan istilah pekerja wisata dinilai bisa menjadi *eufemisme*³ ketimbang menggunakan nama pekerja seks, wanita binaan, tuna sosial, lonte, pelacur, atau nama lain yang sejenis. Perkawis hadir untuk mengawal satu isu penting yang tidak pernah dilakukan negara. Dalam beberapa kesempatan sikap penyangkalan terhadap keberadaan praktik prostitusi di Bandungan membuat pemerintah daerah cenderung menghindari dari tanggung jawab penanganan isu tersebut, meskipun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan ini dapat muncul kapan saja. Dalam konteks inilah, komunitas Perkawis hadir dan mengambil peran penting sebagai pengatur mandiri yang berupaya mengelola serta memitigasi berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja seks komersial, (Santury et al., 2022).

Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dunia Prostitusi Di Bandungan

Pekerja seks komersial (PSK) di Bandungan menghadapi beragam tantangan dalam menjalani profesinya. Selain stigma sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, mereka juga rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan ini tidak hanya datang dari pelanggan, tetapi juga dari pasangan, pacar, bahkan masyarakat sekitar yang merasa dirugikan oleh keberadaan mereka, terutama di kalangan warga Bandungan yang memiliki nilai agama yang kuat. Kekerasan yang dialami oleh PSK mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penjambakan rambut, hingga pemaksaan hubungan seksual. Kekerasan psikis sering kali berupa penghinaan, makian, dan stigma negatif yang melekat pada mereka. Sementara itu, kekerasan seksual dapat terjadi ketika pelanggan memaksa PSK untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa profesi sebagai PSK di Bandungan tidak hanya menghadirkan tantangan ekonomi, tetapi juga risiko kekerasan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh PSK guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka.

Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat Riyanto (2020) yang mengemukakan bahwa bentuk kekerasan yang paling menarik perhatian saat ini adalah kekerasan yang secara ekspresif menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Riyanto menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat,

³ KBBBI, ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan

sebagaimana tercermin dalam opini publik, cenderung menafsirkan kekerasan semacam ini sebagai tindakan yang didorong oleh keyakinan pelaku bahwa mereka merupakan bagian dari komunitas yang berbeda secara ideologis. Individu-individu tersebut, menurutnya, sering kali terpapar ideologi radikal yang membuat mereka secara keliru meyakini bahwa tujuan hidup mereka adalah memerangi pihak-pihak yang dianggap berbeda atau bertentangan dengan nilai-nilai mereka.

Dalam hal ini, pekerja seks komersial dapat dikategorikan sebagai korban kekerasan karena mereka kerap menerima perlakuan yang merugikan secara fisik, psikis, maupun seksual sebagai bagian dari risiko pekerjaan mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Saputro (2023), yang menyatakan bahwa korban kekerasan adalah individu yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penganiayaan ringan maupun berat, pemaksaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, tindakan yang menyebabkan kehilangan kesadaran, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan semacam inilah yang juga dialami oleh sejumlah pekerja seks komersial di wilayah Bandungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa PSK tidak hanya menghadapi stigma sosial dan tekanan ekonomi, tetapi juga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelanggan, pasangan, hingga masyarakat sekitar. Kekerasan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks dan saling terkait, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga seksual. Penjelasan berikut akan menguraikan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kekerasan yang kerap mereka alami dalam kesehariannya.

1. Kekerasan Fisik

La Pona dalam Hidayati (2023) menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah segala macam tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik pada korbannya. Pernyataan ini menjadi relevan ketika melihat kondisi para pekerja seks komersial (PSK) di Bandungan yang kerap menjadi sasaran kekerasan semacam itu. Berdasarkan data hasil wawancara dengan informan bernama Disty yang merupakan salah satu PSK di Bandungan, kekerasan fisik yang dialami oleh para pekerja seks komersial di Bandungan meliputi pemukulan menggunakan tangan kosong atau pun botol miras, penyulutan menggunakan rokok dan pencekikan. Selain ketiga hal tersebut mereka juga dipaksa melakukan persetubuhan dengan dicekoki minuman keras secara paksa terlebih dahulu. Kekerasan fisik tersebut terjadi di dalam ruangan karaoke. Kondisi ini mencerminkan betapa rentannya posisi para PSK terhadap kekerasan yang sistematis dan sering kali tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Kekerasan fisik semacam ini tidak hanya menimbulkan luka secara langsung, tetapi juga memperkuat stigma dan marginalisasi terhadap kelompok pekerja seks, yang justru membuat mereka semakin terpinggirkan dalam sistem sosial dan hukum yang ada.

Dalam tulisan Hidayati (2023) juga dijelaskan bahwa kondisi mabuk sudah menjadi hal yang dianggap wajar dalam dunia malam. Namun, situasi tersebut sangat berpotensi memicu tindakan-tindakan yang tidak terkendali dan membahayakan orang lain. Hidayati mencontohkan bahwa ketika seorang pelanggan laki-laki yang telah mengonsumsi minuman beralkohol

kemudian *membooking* pekerja seks komersial (PSK) dalam keadaan mabuk, kemungkinan terjadinya kekerasan menjadi sangat tinggi. Fenomena ini menggambarkan salah satu risiko nyata yang dihadapi oleh PSK, khususnya di lingkungan hiburan malam seperti di Bandungan. Dalam kondisi pelanggan yang kehilangan kendali akibat pengaruh alkohol, PSK tidak hanya rentan terhadap kekerasan fisik, tetapi juga terhadap kekerasan seksual maupun perlakuan tidak manusiawi lainnya. Keadaan ini diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja seks, serta minimnya pengawasan terhadap praktik-praktik yang terjadi di tempat-tempat hiburan malam.

Selanjutnya terdapat juga kekerasan fisik ekstrim yang dialami oleh pekerja seks komersial di Bandungan berupa penghilangan nyawa atau pembunuhan. Dalam hal ini sudah termasuk dalam femisida. Menurut Komnas Perempuan dalam Sabrina (2024), disebutkan bahwa femisida dalam konteks industri seks komersial adalah pembunuhan terhadap perempuan pekerja seks karena terjadi konflik dengan klien atas perselisihan biaya atau konflik dengan suatu kelompok yang didasarkan atas rasa kebencian terhadap perempuan pekerja seks komersial. Sebagai contoh adalah berita yang ditulis oleh Sundoyo (2008) yang dikutip dari laman OKEZONE News pada 18 Januari 2008. Dengan kronologi kejadian sebagai berikut, pembunuhan tersebut terjadi di Hotel Citra Dewi Bandungan sekitar pukul 04.30 pagi, adapun pembunuh adalah pelanggan dari pekerja seks bernama Riska (26). Riska tewas dengan leher nyaris putus dan tusukan di dada dengan sebilah pisau dapur. Pelaku pembunuhan ini mengaku jika niatnya memang untuk merampok barang milik pekerja seks komersial tersebut dan membunuhnya. Bahkan saat di perjalanan pelaku singgah untuk membeli pisau dapur.

Kasus pembunuhan terhadap Riska seperti dalam berita tersebut menggambarkan dengan jelas betapa ekstremnya bentuk kekerasan yang dapat dialami oleh pekerja seks komersial, bahkan hingga merenggut nyawa. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan kerentanan fisik PSK, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka berada dalam posisi sosial yang lemah, yang membuat mereka lebih rentan menjadi sasaran kejahatan. Femisida dalam konteks ini merupakan akibat dari dehumanisasi dan stigma sosial yang melekat pada perempuan yang bekerja di industri seks, sehingga kekerasan terhadap mereka seringkali dianggap wajar atau tidak mendapat perhatian yang serius dari publik maupun aparat penegak hukum. Fenomena ini menuntut perhatian lebih terhadap perlindungan hukum dan sosial bagi PSK, serta pengakuan atas hak mereka sebagai manusia yang berhak hidup bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun.

2. Kekerasan Psikis

Selain kekerasan fisik, pekerja seks komersial di Bandungan juga rentan mengalami kekerasan psikis yang berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Bentuk kekerasan ini sering kali tersembunyi namun meninggalkan luka mendalam yang tak kalah serius dibandingkan kekerasan fisik, Saputro (2023) menyatakan bahwa kekerasan psikis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman

dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Berdasarkan data wawancara dengan informan bernama Sonya seorang wanita yang melakukan *live streaming* berbaur seksual di aplikasi Bigo, kekerasan psikis yang dialami adalah dijauhi oleh para tetangga dan dicap sebagai wanita nakal. Selain dalam lingkup tetangga, informan juga dijauhi oleh teman-teman sekolahnya semasa SMA karena dinilai sudah menjadi perempuan yang tidak benar. Kekerasan psikis yang dialami oleh informan juga berupa lontaran kata-kata yang tidak pantas di kolom akun instagramnya.



Gambar 1. Komentar di Kolom Instagram Informan
Sumber: Dokumentasi Instagram Pribadi Penulis, 2025

Pengalaman Sonya yang tergambar dalam tangkapan layar di atas menunjukkan bagaimana tekanan sosial dan kekerasan psikis dapat muncul dalam bentuk penolakan sosial serta pelecehan verbal, baik secara langsung maupun melalui media digital. Pola serupa juga ditemukan dalam berbagai penelitian sebelumnya yang menyoroti stigma negatif terhadap perempuan yang bekerja dalam industri seksual. Melalui penelitian Hidayati (2023) disebutkan bahwa ketika seorang perempuan memilih pekerjaan sebagai PSK maka segala atribut dan stigma negatif yang berlawanan dengan norma dan agama akan menempel pada mereka. Mereka dianggap sampah masyarakat, penyebar penyakit kelamin dan penularan HIV dan AIDS (walaupun anggapan ini

tidak tepat, karena yang menularkan HIV adalah laki-laki, dan PSK adalah korban, yang apabila tertular akan memperpanjang mata rantai penularan HIV). Segala stigma negatif tersebut mau tidak mau diterima oleh para PSK, karena mereka menganggap itu adalah resiko dari profesi yang mereka pilih. Dari penjelasan tersebut dapat menggambarkan dengan jelas bentuk kekerasan psikis yang dialami oleh pekerja seks komersial, yaitu dalam bentuk stigma sosial yang melekat kuat dalam kehidupan mereka. Label seperti "sampah masyarakat" dan "penyebarkan penyakit" bukan hanya menciptakan jarak sosial, tetapi juga merusak harga diri dan identitas para PSK secara mendalam. Kekerasan semacam ini sulit diukur secara kasat mata, namun berdampak langsung pada kesehatan mental mereka, termasuk rasa malu, rendah diri, isolasi sosial, hingga depresi. Stigma tersebut tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga sering kali diperkuat oleh narasi-narasi moral dan keagamaan yang menempatkan mereka sebagai pihak yang bersalah, padahal dalam kenyataannya mereka adalah korban dari tekanan ekonomi dan sistem sosial yang timpang.

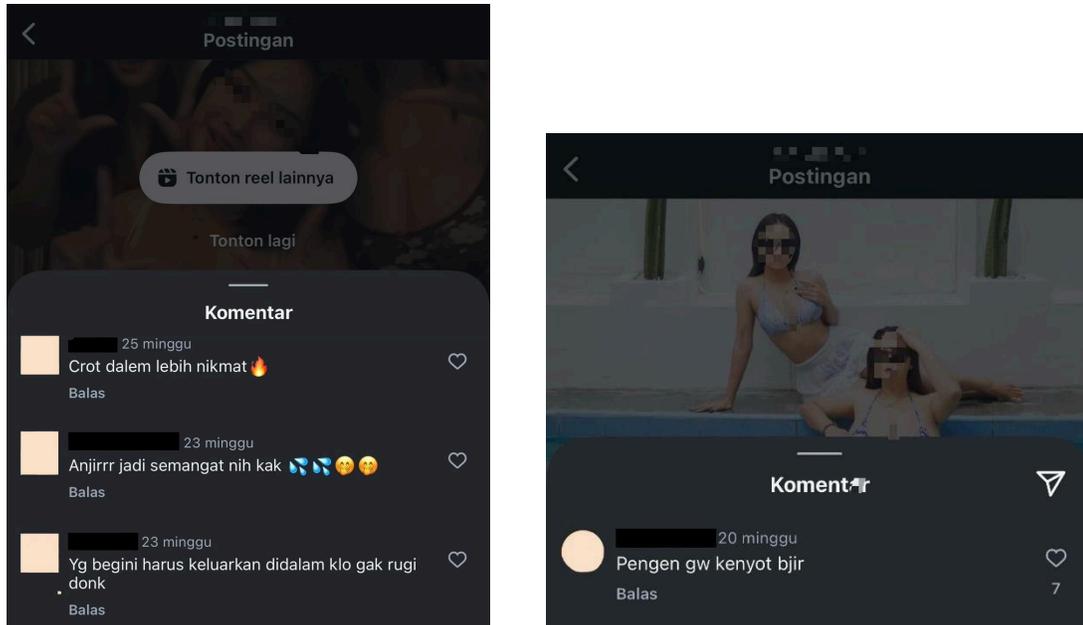
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk kekerasan yang juga sangat membebani kehidupan para pekerja seks komersial adalah kekerasan psikis. Setelah memahami berbagai stigma dan tekanan sosial yang mereka hadapi, penting untuk menyoroti bagaimana beban mental ini juga merupakan bagian dari bentuk kekerasan yang lebih luas, yaitu kekerasan struktural. Kekerasan ini tidak bersifat langsung seperti kekerasan fisik, tetapi bekerja secara sistemik melalui ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya yang menempatkan PSK dalam posisi rentan secara berkelanjutan. Menjadi pekerja seks komersial adalah suatu hal yang berat dan memiliki banyak konsekuensi, termasuk pada kesehatan mental atau psikis dari para pekerja tersebut. Dalam artikel Ho (2007), Paul Farmer, seorang antropolog medis dan dokter, menegaskan bahwa kekerasan struktural bukanlah akibat dari kecelakaan atau *force majeure*; kekerasan struktural merupakan konsekuensi, langsung atau tidak langsung, dari tindakan manusia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penderitaan yang dialami oleh PSK, baik dalam bentuk diskriminasi, stigma, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, maupun pelecehan sosial, bukanlah hasil dari nasib buruk semata. Melainkan, hal itu terjadi karena adanya sistem sosial dan kebijakan yang tidak adil, yang secara sengaja atau tidak, mempertahankan ketimpangan dan menjadikan kelompok rentan seperti PSK terus mengalami penindasan. Dalam konteks ini, kekerasan psikis yang mereka alami merupakan hasil dari struktur sosial yang menormalisasi ketidaksetaraan.

3. Kekerasan Seksual

Selain kekerasan fisik dan psikis, bentuk kekerasan lain yang kerap dialami oleh pekerja seks komersial di Bandung adalah kekerasan seksual, yang sering terjadi dalam relasi yang timpang antara PSK dan pelanggan. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang. Kekerasan ini merupakan perbuatan atau tindak pidana yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesucian di mana terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana, dengan salah satu pasal tentang

kejahatan kesusilaan yang mengandung unsur kekerasan yaitu pasal 285, (Saputro, 2023). Melalui data yang dikumpulkan dari informan yang sama bernama Disty, para PSK juga mengalami kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan pelanggan atau tamunya. Pemaksaan ini dilakukan dengan membuat para PSK ini tidak sadarkan diri. Ketika mereka berada dalam posisi tidak sadar mereka disetubuhi oleh para pelanggan. Tidak jarang pula mereka disetubuhi secara beramai-ramai di ruangan tempat karaoke. Hal ini dikuatkan oleh data yang didapatkan melalui pengakuan dari seorang informan penelitian bernama Bapak Hendro yang mempunyai kios di deretan depan kost Wahyu, Junggul Bandung, mengenai salah satu cerita yang cukup menyedihkan. Beliau menyebutkan bahwa, “dulu ada mbak-mbak, ngamuk dia di jalan depan sini, katane belum dibayar habis dipake rame-rame, wahh dia jalan setengah telanjang di depan sini, ngamuk beneran, malem banget tu *meh* (hampir) dini hari, saya sedih lihate”. Kisah yang disampaikan oleh Bapak Hendro memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap pekerja seks komersial tidak hanya meninggalkan luka fisik maupun psikis, tetapi juga mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Peristiwa semacam ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola kekerasan sistemik yang kerap dialami oleh para PSK.

Berdasarkan penelitian Saputro (2023) mengenai kekerasan seksual yang dialami para pekerja seks komersial, mereka menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, termasuk paksaan ke PSK yang tergolong masih berusia anak-anak. Pelecehan seksual ini juga terkadang dilakukan melakukan ungkapan verbal. Berikutnya adalah data yang berasal dari informan yang sama bernama Sonya merupakan pekerja seks komersial secara *online*, mereka menyatakan bahwa mereka sering mendapatkan pelecehan secara verbal baik di kolom komentar postingan instagramnya maupun secara langsung, saat mereka sedang berjalan-jalan. Berkaitan dengan kekerasan seksual secara verbal ini, terkadang mereka cenderung mengabaikannya dan tidak mengambil hati. Bahkan tidak sedikit dari mereka sudah biasa dengan candaan berbau seksual yang ditunjukkan kepada mereka.



Gambar 2 dan 3. Contoh Candaan Berbau Seksual di dalam Kolom Komentar Instagram Sonya
Sumber: Dokumentasi Instagram Pribadi Penulis, 2025

Contoh lain dari kekerasan verbal juga ditemukan melalui pesan langsung (*DM- direct message*) di Instagram yang diterima oleh Sonya. Ia mengaku kerap mendapatkan pesan dengan isi yang melecehkan, seperti ajakan berhubungan seksual secara eksplisit, permintaan foto vulgar, hingga kata-kata kasar yang merendahkan martabatnya sebagai perempuan. Pesan-pesan semacam ini tidak hanya datang dari satu atau dua akun, melainkan cukup sering dan berasal dari berbagai pengguna yang tidak dikenalnya secara pribadi. Meskipun beberapa pesan diabaikan, dampaknya tetap terasa dalam bentuk tekanan psikologis dan rasa tidak nyaman yang terus menerus hadir saat membuka media sosial. Agar dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bentuk kekerasan verbal yang dialami oleh pekerja seks komersial secara daring, berikut ini disampaikan salah satu contoh pesan langsung yang diterima oleh informan bernama Sonya melalui akun Instagram pribadinya. Perlu disampaikan bahwa pesan ini mengandung istilah vulgar yang sangat tidak pantas secara etika dan bahasa, namun tetap penting untuk diungkap sebagai bagian dari data lapangan yang menunjukkan tingkat kekerasan verbal yang mereka alami secara rutin. Istilah “*cl*” dalam konteks tangkapan layar di bawah ini merupakan singkatan dari “*colek memek*”(sentuhan pada alat kelamin perempuan), sebuah frasa kasar yang merujuk pada pelecehan seksual secara verbal. Pesan-pesan seperti ini tidak hanya menunjukkan minimnya penghormatan terhadap tubuh dan martabat perempuan, tetapi juga menjadi bentuk kekerasan yang dapat berdampak pada kesehatan mental para korban.



Gambar 4. Salah Satu Contoh Chat yang Membuat Sonya Tidak Nyaman
Sumber: Dokumentasi Instagram Pribadi Penulis

Lundgren dalam Bjorkert et al. (2016) menyatakan bahwa salah satu dampak dari pelecehan seksual terhadap perempuan adalah kecenderungan korban untuk mulai memandangi relasi mereka melalui sudut pandang pelaku. Akibatnya, perempuan secara bertahap kehilangan suara dan perspektif pribadi mereka dalam hubungan tersebut. Dalam banyak kasus, korban merasa tidak yakin, bingung, dan kesulitan memahami serta menjelaskan apa yang sebenarnya mereka alami. Hal ini menyebabkan mereka sulit mengartikulasikan pengalaman tersebut kepada orang lain. Salah satu informan dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa pelecehan tidak hanya dialami oleh pekerja seks komersial, tetapi dapat menimpa perempuan mana pun, karena pelaku kekerasan seksual kerap mengabaikan konteks relasi dan lebih berlandaskan pada dominasi dan kontrol. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan individu, tetapi berkaitan erat dengan struktur sosial yang memungkinkan terjadinya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan luka fisik dan psikologis, tetapi juga berdampak pada kehidupan jangka panjang korban, termasuk kehamilan yang tidak direncanakan. Dalam konteks pekerja seks komersial, kehamilan ini menjadi beban tambahan, terlebih ketika pelaku enggan bertanggung jawab, sehingga perempuan harus menanggung konsekuensinya seorang diri. Kekerasan seksual yang dialami oleh pekerja seks komersial di Bandung juga sering kali

berujung pada kehamilan yang tidak direncanakan. Berdasarkan keterangan dari salah informan penelitian bernama Ibu Nada yang tinggal di wilayah Junggul, Bandungan, menyatakan jika beberapa PSK diketahui melakukan hubungan badan hingga akhirnya hamil. Namun, pelaku kekerasan, atau laki-laki yang disebut sebagai "hidung belang" tersebut sering kali melarikan diri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Informan tersebut bahkan pernah membantu seorang PSK bernama Ivone yang hendak melahirkan di dalam kos-kosan dengan menyewakan angkot hijau (trayek Bandungan–Babadan) untuk membawanya ke rumah sakit. Ia juga menceritakan pengalaman serupa, di mana seorang PSK hamil oleh pacarnya, namun ditinggalkan ketika hendak melahirkan. Selain itu, banyak pekerja seks komersial di lingkungan tersebut yang menjadi simpanan atau selingkuhan pria hidung belang yang biasa mereka panggil dengan sebutan “Papi”.

“Kalo untuk kasus mbak Ivone itu, jadi Mbak Ivone langganan *delivery order*nya ibu, lha Mbak Ivone hamil gede, laki-lakinya ndak tanggung jawab, mau ngelahirin gak ada yag nolong di kos-kosan waktu itu kan, terus ibu bantu pas itu hujan deres, ibu anter ke RSU, terus yaudah ibu tinggal, terus karena gak bisa membiayai atau gimana atau dia ingin bebas anaknya dititipin di Pak Lutung, la dititipi tapi sama mbak Ivone gak diurus, Pak Lutungnya juga ndak dikasi duit, ditinggal aja gitu anaknya, sampai sekarang gak ada kabar, kasihan itu anaknya”, (Wawancara dengan Ibu Nada).

Selain kasus di atas, terdapat pula kasus lain yang diceritakan oleh Bu Nada. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terdapat banyak fenomena penelantaran anak yang dilakukan oleh para pekerja seks ini. Mereka melakukan penelantaran anak dengan modus menitipkan anak ke warga yang membuka jasa penitipan anak di Desa Junggul, Bandungan. Pada awalnya para pekerja seks komersial ini membayar jasa penitipan anak tepat waktu, namun semakin hari mereka tidak membayar jasa tersebut dan mulai tidak bisa dihubungi. Kondisi ini menimbulkan beban moral dan ekonomi bagi penyedia jasa penitipan, sekaligus menunjukkan adanya dampak sosial lanjutan dari praktik kerja seksual terhadap pihak-pihak di sekitar mereka, termasuk anak-anak yang menjadi korban penelantaran.

“LC-LC itu kan berhubungan badan gak pake KB atau gimana dan laki-lakinya gak mau bertanggung jawab jadi anaknya rata-rata dititipin di Junggul sini. Ada juga yang tanggung jawab nitipin susu, ngasih bayaran yang dititipin gitu juga kan. Ada juga yang melarikan diri, jadi anaknya ditinggal aja gitu udah, pergi pindah gitu”, (Wawancara dengan Ibu Nada).

Menurut keterangan dari Bu Nada, sejak tahun 2020 terdapat dua anak terlantar di RT 08 Desa Junggul, Bandungan yang merupakan hasil dari kehamilan tidak terencana. Selain itu, satu kasus serupa juga ditemukan di RT 04 desa yang sama. Bu Nada menjelaskan bahwa alasan para ibu meninggalkan anak-anak tersebut umumnya karena mereka tidak mengetahui siapa ayah biologisnya, serta menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Ketiga anak itu kemudian diasuh oleh warga yang bersedia merawat mereka, dan sejak kecil memang tidak diberi tahu asal-usul

mereka. Hingga saat ini, anak-anak tersebut tidak mengetahui bahwa mereka adalah hasil dari hubungan para pekerja seks komersial dengan pelanggan laki-laki.

Data-data yang disampaikan oleh informan tersebut atas selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santury et al. (2022) dengan judul “Bagaimana Komunitas PSK Melindungi Dirinya: Sebuah Etnografi Prostitusi di Bandungan”, yang menyatakan bahwa salah satu persoalan yang sering muncul dan sulit terselesaikan adalah kehamilan. Apabila melihat fenomena yang ada di sana, berdasarkan dari penelitian yang saya lakukan. Sebetulnya, kasus hamil di luar nikah yang lebih banyak terjadi dengan pacar PSK ketimbang dengan pelanggan. Meskipun memang ada beberapa kasus kehamilan akibat hubungan dengan pelanggan, namun tidak sebanyak yang terjadi dengan pacarnya. Umumnya, ketika terjadi kehamilan, para PSK ini menggugurkan kandungannya atau melahirkan lalu membuang anaknya. Dua opsi ini ditentang oleh Perkawis, karena dianggap menyalahi hukum resmi negara juga bertentangan dengan norma sosial pada umumnya. Posisi tegas perkawis ini dilakukan agar tidak muncul persoalan yang lebih serius dalam ranah hukum dan sosial nantinya.

Fenomena kehamilan yang tidak diinginkan akibat relasi kekerasan seksual, baik dari pacar maupun pelanggan, menunjukkan betapa kompleks dan beratnya konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pekerja seks komersial. Mereka tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga harus menanggung beban sosial, psikologis, hingga potensi kriminalisasi atas pilihan-pilihan sulit yang mereka ambil. Di sinilah urgensi hadirnya dukungan struktural dan sosial sangat dibutuhkan, bukan untuk melegalkan praktik prostitusi secara semata, melainkan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka sebagai manusia tetap dijaga. Dalam konteks ini, komunitas seperti Perkawis memainkan peran krusial sebagai bentuk perlindungan alternatif yang selama ini belum secara memadai diberikan oleh negara.

KESIMPULAN

Fenomena pekerja seks komersial (PSK) di Bandungan menggambarkan realitas sosial yang kompleks, di mana faktor ekonomi, tekanan hidup, relasi kuasa, dan konstruksi budaya berkelindan membentuk keputusan individu untuk terlibat dalam praktik prostitusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa menjadi PSK bukanlah pilihan yang lahir dari kehendak bebas semata, melainkan hasil dari keterbatasan struktural yang memaksa perempuan, baik sebagai buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, maupun remaja, untuk mencari penghidupan melalui cara yang dianggap tabu oleh masyarakat. Sepanjang praktiknya, para PSK di Bandungan menghadapi berbagai bentuk kekerasan: fisik, psikis, hingga seksual. Kekerasan ini tidak hanya dilakukan oleh pelanggan, tetapi juga oleh pacar, masyarakat sekitar, hingga negara melalui sikap pembiaran dan stigmatisasi. Kehamilan yang tidak diinginkan, marginalisasi, serta hilangnya kendali atas tubuh dan martabat diri menjadi bagian dari konsekuensi yang harus mereka tanggung. Dalam konteks ini, kehadiran komunitas seperti Perkawis menjadi bentuk solidaritas dari bawah, yang meski terbatas, berupaya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar para PSK.

Dengan menggunakan pendekatan etnografi penelitian ini menyoroti bahwa ketimpangan struktural menjadi akar dari lahirnya ketegangan sosial antara kelompok dominan dan kelompok terpinggirkan seperti PSK. Data sekunder berupa artikel dan berita *online* juga membantu memvalidasi pernyataan dari para informan. Stigma yang dilekatkan pada profesi ini tidak hanya meminggirkan mereka secara sosial, tetapi juga memperkuat legitimasi kekerasan terhadap tubuh perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lintas sektor dan pendekatan yang lebih manusiawi untuk mengatasi persoalan ini. Tidak hanya dengan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan, tetapi juga melalui pembukaan akses pendidikan, lapangan kerja yang layak, serta pembongkaran stigma sosial terhadap pekerja seks. Penanganan yang menyeluruh dan berkeadilan akan menjadi langkah awal menuju tatanan masyarakat yang tidak lagi membiarkan kekerasan terjadi atas nama moral, ekonomi, maupun budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bjorkert et al. (2016).). *Exploring symbolic violence in the everyday: misrecognition, condescension, consent, and complicity*. Sage Publications, Ltd. *Feminist Review*, 2016, No. 112, *violence* (2016), pp. 144-162. .
- Budiman. (2022, November 2). *Jika Malam Minggu, 1000 Wanita Jual Diri di Bandung*. Retrieved from JATENG POS.co.id.: <https://jatengpos.co.id/jika-malam-minggu-1000-wanita-jual-diri-di-bandungan/arif/>
- Hidayati, N. (2023). *Kekerasan Pada Pekerja Seks Komersial*. *Repository Universitas Jember*.
- Ho, K. (2007). *Structural Violence as a Human Rights Violation*. . *Essex Human Rights Review Vol. 4 No. 2 September 2007*.
- KomnasPerempuan. (2019). *“Risalah Kebijakan, Perempuan Yang Dilacurkan, Masih Adakah Hak Kami?”* ISBN 978-602-330-037-2. Retrieved from Diambil dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/42>
- Permatasari, & Pinasti. (2017). *FENOMENA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KAWASAN STASIUN KERETA API KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH*. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Rahmaniah, A. (2016). *Metateorizing: Teori Konflik (Ralf Dahrendorf)*. Malang: *UIN Maliki Malang*.
- Rakhmah, & Putra. (2024). *Faktor Sosial yang Mempengaruhi Seorang Menjadi Pekerja Seks Komersial di Makassar Sulawesi Selatan*. *UMI Medical Journal Vol.9 Issue:1 (Juni, 2024) p-ISSN: 2548-4079/e-ISSN: 2685-7561*.
- Riyanto. (2020). *Where is the violence in identity-related violence? The generative potentiality of violence in ethno-religious conflict and mass purging in Indonesia*. *Journal of Social Studies (JSS)*, ISSN: 1858-2656 (p); 2721-4036 (e) Vol. 16. No. 1 (2020), pp.83-102,.

- Sabrina, D. (2024). Perempuan Indonesia Dalam Pusaran Kekerasan dan Ancaman Femisida. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.6*, .
- Santury et al. (2022). Bagaimana Komunitas PSK Melindungi Dirinya: Sebuah Etnografi Prostitusi di Bandung. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol.4 No.1, June 2022, pp. 1-13 P-ISSN: 2686-0279 --- E-ISSN: 2685-8096*.
- Saputro. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SURABAYA. *NOVUM: Jurnal Hukum. (167). DOI: 10.2674/novum. V 3i3.56683, diakses pada 8 Oktober 2023, 13:45 WIB*.
- Sundoyo. (2008). *PSK Dibunuh Pelanggan di Kamar Hotel*. Retrieved from OKEZONE news.: <https://news.okezone.com/read/2008/01/18/1/78947/psk-dibunuh-pelanggan-di-kamar-hotel>.
- Utomo, N. P. (2022). Presentasi Diri Pekerja Seks Komersial (PSK) Perempuan Di Lingkungan Kerja, Sosial dan Keluarga Kota Depok. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.